



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 – Jakarta 10110,
Telp (021) 31926519, www.kemendagri.go.id email
ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

27 Agustus 2026

Nomor : 300.6.10/e.1095/BAK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Peserta

Yth. (Daftar nama terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam pencegahan serta penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Papua, perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi melalui *Zoom Meeting* yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait, pada :

hari : Jumat
tanggal : 28 Agustus 2026
pukul : 13.00 WIB - Selesai
pimpinan rapat : Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M selaku Wakil Menteri Dalam Negeri
zoom meeting : Meeting ID: 968 5880 7553
Passcode: KARHUTLA
<https://kemendagri.go.id.zoom.us/j/96858807553?pwd=07MDG3wqiS1YTZ8Xm4ZKStt9SvhvsT.1>

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti dan hadir tepat waktu pada rapat dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Adam (08119344443) dan Sdr. Vitus (081284088281).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,
Sekretaris Direktorat Jenderal



Sri Purwaningsih, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19700416 199503 2 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

**DAFTAR NAMA PESERTA
RAPAT KOORDINASI KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)**

A. Kementerian Dalam Negeri

1. Wakil Menteri Dalam Negeri 1;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
5. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara;
6. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama;
7. Direktur Toponimi dan Batas Daerah;
8. Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
9. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
10. Kasubdit Standarisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Kebakaran pada Dit. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
11. Kasubdit Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana pada Dit. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
12. Kasubdit Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja;
13. Kasubdit Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Perlindungan Hak-Hak Sipil serta Hak Asasi Manusia;
14. Kasubdit Perlindungan Masyarakat pada Dit. Satpol PP dan Linmas;

B. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;

C. Kementerian Kehutanan

1. Sekretaris Dirjen, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Direktur Pengendalian Kebakahan Hutan, Ditjen Pengakan Hukum;

D. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1. Direktur Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Pencegahan;
2. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat, Deputi Bidang Penanganan Darurat;
3. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;

E. Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika

1. Direktur Perubahan Iklim, Deputi Bidang Klimatologi;

F. Pemerintah Daerah

✓ Tingkat Provinsi

1. Gubernur Prov Papua;
2. Gubernur Prov Papua Barat;
3. Gubernur Prov Papua Tengah;
4. Gubernur Prov Papua Pegunungan;
5. Gubernur Prov Papua Selatan;
6. Gubernur Prov Papua Barat Daya;

✓ Tingkat Kabupaten

1. Bupati Biak Numfor;
2. Bupati Jayapura;
3. Bupati Keerom;
4. Bupati Kep. Yapen;
5. Bupati Mamberamo Raya;
6. Bupati Sarmi;
7. Bupati Supiori;
8. Bupati Waropen;
9. Bupati Fakfak;
10. Bupati Kaimana;
11. Bupati Manokwari;
12. Bupati Manokwari Selatan;
13. Bupati Pegunungan Arfak;
14. Bupati Teluk Bintuni;
15. Bupati Teluk Wondama;
16. Bupati Deiyai;
17. Bupati Dogiyai;
18. Bupati Intan Jaya;
19. Bupati Mimika;
20. Bupati Nabire;
21. Bupati Paniai;
22. Bupati Puncak;
23. Bupati Puncak Jaya;
24. Bupati Jayawijaya;
25. Bupati Lanny Jaya;
26. Bupati Mamberamo Tengah;
27. Bupati Nduga;

28. Bupati Pegunungan Bintang;
29. Bupati Tolikara;
30. Bupati Yalimo;
31. Bupati Yahukimo;
32. Bupati Asmat;
33. Bupati Boven Digoel;
34. Bupati Mappi;
35. Bupati Merauke;
36. Bupati Maybrat;
37. Bupati Raja Ampat;
38. Bupati Sorong;
39. Bupati Sorong Selatan;
40. Bupati Tambrau;

✓ **Tingkat Kota**

1. Walikota Jayapura; dan
2. Walikota Sorong.

a.n. Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,
Sekretaris Direktorat Jenderal



Sri Purwaningsih, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19700416 199503 2 001